



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dan berdasarkan kaidah – kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Laporan Keuangan ini meliputi :

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA, belanja, selama Semester II / periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Laporan Keuangan TA. 2023 terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar **Rp.25,106,745,-** atau **557,93** persen dari target yang ditetapkan sebesar **Rp.4,500,000,-**.

Realisasi Belanja SKIPM Mamuju (netto) Semester II/Per 31 Desember TA.2023 adalah sebesar **Rp.4,839,699,601,-** atau **98,65** persen dari anggaran sebesar **Rp.4,905,696,000,-**. Jumlah realisasi Belanja (Netto) tersebut terdiri dari realisasi **Belanja Rupiah Murni**. Sementara Belanja dari PNBP sebesar **Rp.0,-** atau **0 persen** dari anggarannya sebesar **Rp.4,500,000,-**. Sementara realisasi Bruto Rupiah Murni SKIPM Mamuju sebesar **Rp. 4,839,699,601,-** dengan ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:



SKIPM Mamuju
Laporan Keuangan Semester II TA 2023

Realisasi Anggaran Belanja SKIPM Mamuju Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	(dalam rupiah)					
	Per 31 Des / TA.2023			Per 31 Des / TA.2022		
	Anggaran	Realisasi Belanja	%	Anggaran	Realisasi Belanja	%
Pendapatan Negara	4.500.000	9.441.109	209,80	23.000.000	9.441.109	41,05
JUMLAH PENDAPATAN	4.500.000	9.441.109	209,80	23.000.000	9.441.109	41,05
Belanja Rupiah Murni	4.905.696.000	4.839.699.601	98,65	4.175.484.000	4.143.297.652	99,23
Belanja Pinjaman dan Hibah	0	0	0,00	0	0	0,00
JUMLAH BELANJA	4.905.696.000	4.839.699.601	98,65	4.175.484.000	4.143.297.652	99,23

Realisasi belanja **Bruto** TA. 2023 SKIPM Mamuju sebesar Rp **4,839,699,601,-** atau 98,65 persen dari anggarannya sebesar Rp.4,905,696,000,-. Terdapat pengembalian belanja sebesar Rp.0,-. Sementara realisasi belanja pada TA 2022 sebesar Rp.4,143,297,652,- atau sebesar 99,23 persen dari anggarannya sebesar Rp.4,175,484,000,-. Untuk realisasi dari sumber dana yang berasal dari pendapatan negara pada SKIPM Mamuju adalah Rp.0,-, serta pinjaman dan hibah pada SKIPM Mamuju sebesar Rp0,-.

Realisasi belanja **Bruto** SKIPM Mamuju tahun ini sebesar **Rp. 4,839,699,601,-** keseluruhan terdiri dari belanja rupiah murni. Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Semester II/Per 31 Desember 2023 terealisasi sebesar **Rp.25,106,745,-**. Penerimaan ini berasal dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya (425289), Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin (425122) dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911).

II. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar **Rp.9,785,565,300,-**. Yang terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp.67,927,771,-**, Aset Tetap (Netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar **Rp. 9,717,637,529,-** dan Aset Lainnya (Netto setelah akumulasi Penyusutan) sebesar **Rp.0,-**.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar **Rp.10,452,016,-**



SKIPM Mamuju
Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023

Sementara itu Nilai Ekuitas disajikan sebesar **Rp. 9,775,113,284,-**.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Neraca SKIPM Mamuju Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Perkiraan	Tanggal Neraca		(dalam rupiah) Nilai kenaikan / (penurunan)	%
	31-Des-23	31-Des-22		
Aset				
Aset Lancar	67.927.771	61.343.247	6.584.524	10,7
Aset Tetap	9.717.637.529	9.964.976.209	(247.338.680)	(2,5)
Aset Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Aset	9.785.565.300	10.026.319.456	(240.754.156)	(2,4)
Kewajiban				
Kewajiban jk Pendek	10.452.016	9.411.900	1.040.116	0
Jumlah Kewajiban	10.452.016	9.411.900	1.040.116	0
Ekuitas				
Ekuitas	9.775.113.284	9.955.564.309	(180.451.025)	(1,8)
Jumlah Ekuitas	9.775.113.284	9.955.564.309	(180.451.025)	(1,8)
Jmlh Kewajiban dan Ekuitas	9.785.565.300	9.964.976.209	(179.410.909)	(1,8)

III. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp.19,085,000,-** , sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar **Rp.4,791,509,432,-** sehingga terdapat Defisit dari kegiatan Operasional senilai **Rp.(5,002,240,329),-**. Jumlah Surplus/(defisit) dari Kegiatan non operasional lainnya **Rp.6,001,999,-** dan pos-pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar **Rp.0,-** dan Defisit sebesar **Rp.0,-** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **Rp.(4,996,238,330),-** .



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar **Rp.9,955,564,309,-** Dikurangi Defisit-LO sebesar **Rp. (4,996,238,330),-** Dan Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp.4,815,787,206,-** Sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai **Rp., 9,775,113,284,-** .

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan - pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAMUJU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATA TAN	T.A 2023		% thd Anng	T.A 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A. Pendapatan					
1. PNBP	B.1	4,500,000	25,106,745	557,93	9,441,109
Jumlah Pendapatan		23,000,000	9,441,109	41	9,441,109
B. Belanja	B.2				
Belanja Operasi					
1. Belanja Pegawai	B.3	2,440,978,000	4,438,215,387	100	2,413,080,535
2. Belanja Barang	B.4	2,191,168,000	2,127,990,714	97	1,520,909,617
3. Belanja Modal	B.5	273,550,000	273,493,500	100	209,307,500
4. Belanja Bantuan Sosial	B.6	0	0	0	0
Jumlah Belanja		4,905,696,000	4,839,699,601	99	4,143,297,652



SKIPM Mamuju
Laporan Keuangan Semester II TA 2023

II. NERACA

**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN MAMUJU
NERACA PER 31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.4	31,999	19,746
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	0	0
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar	C.7	(160)	(61)
Piutang Bukan Pajak Netto	C.8	31,839	19,647
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	0	0
Persediaan	C.10	67,895,932	61,323,600
Jumlah Aset Lancar		67,927,771	61,343,247
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	0	0
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang	C.13	0	0
Jumlah Piutang Jangka Panjang			
ASET TETAP			
Tanah	C.14	2,741,303,000	2,741,303,000
Peralatan dan Mesin	C.15	4,397,498,720	4,121,133,220
Gedung dan Bangunan	C.16	6,701,292,867	6,701,292,867
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.17	221,640,000	221,640,000
Aset Tetap Lainnya	C.18	47,034,000	47,034,000
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.19	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(4,391,131,058)	(3,928,770,125)
Jumlah Aset Tetap		9,717,637,529	9,903,632,962
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	0	0
Aset Lain – lain	C.22	0	0
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	0	0
Jumlah Aset Lainnya		0	0
JUMLAH ASET		9,785,565,300	9,964,976,209
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	0	0
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	0	0
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	10,452,016	9,411,900
Utang yang Belum Ditagihkan	C.28	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		10,452,016	9,411,900
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	9,775,113,284	9,955,564,309
Jumlah Ekuitas		9,775,113,284	9,955,564,309
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		9,785,565,300	9,964,976,209



III. LAPORAN OPERASIONAL

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAMUJU

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022

Uraian	Catatan	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	19,085,000	7,340,000
Jumlah Pendapatan		19,085,000	7,340,000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2,438,183,388	2,413,080,535
Beban Persediaan	D.3	82,861,033	117,574,000
Beban Barang dan Jasa	D.4	1,088,210,756	959,355,950
Beban Pemeliharaan	D.5	322,127,504	199,742,350
Beban Perjalanan Dinas	D.6	629,591,955	242,222,000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	460,350,533	481,875,879
Beban Penyisihan Piutang tak tertagih	D.10	0	0
Jumlah Beban		5,021,325,329	4,413,845,067
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5,002,240,329)	(4,406,505,067)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Non lancar		6,001,999	
Defisit Penjualan Aset Non lancar			(3,062,204)
Defisit Selisih Kurs			
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya			528
Beban dari kegiatan non operasional lainnya			1,830,972
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		6,001,999	(4,892,648)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(4,996,238,330)	(4,411,397,715)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNPB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
SURPLUS / DEFISIT LO		(4,996,238,330)	(4,411,397,715)



IV.LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

STASIUN KARANTINA IKAN,PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAMUJU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022

Uraian	Catatan	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	9,955,564,309	10,233,105,037
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(4,996,238,330)	(4,411,397,715)
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	E.3	0	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	99	444
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.2	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.3	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.4	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.5	0	2,011,695
Koreksi Lain-lain	E.3.6	99	(2,011,251)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		4,815,787,206	4,133,856,543
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(180,451,025)	(277,540,728)
EKUITAS AKHIR		9,775,113,284	9,955,564,309



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAMUJU

Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju didirikan sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis BKIPM. Stasiun Karantina Ikan Kelas II Mamuju berdiri tahun 2008 terus melakukan pembenahan dalam rangka melakukan upaya pencegahan Hama dan penyakit Ikan Karantina dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan perkarantinaan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.21/MEN/2008 tanggal 17 Nopember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Wilayah Kerja Karantina Ikan Mamuju berubah status menjadi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan Stasiun Karantina Ikan Kelas II Mamuju.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, ditetapkan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) melaksanakan tugas pengembangan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Kedudukan UPT BKIPM ditempat-tempat pemasukan dan pengeluaran wilayah yaitu di bandar udara, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pos lintas batas dan kantor pos, berperan penting dalam mencegah masuk tersebar nya hama penyakit ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilalulintaskan. Keberadaan karantina ikan di bandar udara diatur dalam annex 9 tentang fasilitasi (*fasilitation*) Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation*)



Sedangkan di pelabuhan laut diatur dalam organisasi kemaritiman internasional (IMO).

Untuk mewujudkan Visi SKIPM Mamuju **Hasil Perikanan yang Sehat Bermutu, Aman Konsumsi dan Terpercaya** maka dilaksanaklah tugas dan fungsi pokok sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa hama dan penyakit ikan/hama penyakit ikan karantina(HPI/HPIK);
2. Menjamin Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
3. Pembuatan koleksi hama dan penyakit ikan (HPI) dan hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) serta media pembawa HPI dan HPIK;
4. Pengumpulan dan Pengolahan data tindakan karantina ikan;
5. Pemantuan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina;
6. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan ikan;
7. Pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan tata usaha.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor SKIPM Mamuju. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan



neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Kantor SKIPM Mamuju menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor SKIPM Mamuju dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI



Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan semester I/Per 31 Desember 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Mamuju. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan SKIPM Mamuju adalah sebagai berikut:

*Pendapatan
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang



bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada SKIPM Mamuju adalah Pendapatan Negara Bkan Pajak berupa Jasa Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan (423215) pada Pelabuhan Penyeberangan Fery Mamuju – Balikpapan, Bandar Udara Tampa Padang dan Pelabuhan Penyeberangan Palipi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan



selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan



membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.



b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan, Jembatan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada kementerian/lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya,



dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2022. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian berupa tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang



yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai



atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10



Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi



berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

*Realisasi
Pendapatan
Rp.25,106,745,-*

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.25,106,745,- atau mencapai 557,93% persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.4.500.000,-. Pendapatan SKIPM Mamuju adalah merupakan Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya (425289), Pendapatan Lain-lain berupa Penerimaan Kembali Belanja Pegawai dari tahun anggaran yang lalu (425911) dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122).

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNPB lainnya sampai dengan tanggal pelaporan tersaji pada Tabel berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	%Real Angg.
PendapatanJasa	0	0	
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi	4.500.000	19,085,000	
PendapatanLain-lain	0	6,021,745	
Jumlah	4.500.000	25,106,745	557,93



SKIPM Mamuju Laporan Keuangan Semester II TA 2023

Realisasi
Belanja Negara
Rp.
4,839,699,601,-

B.2. Belanja

Realisasi belanja SKIPM Mamuju pada Semester II TA 2023 adalah sebesar Rp.4,839,699,601,- atau sebesar 98,65 persen dari anggarannya. Anggaran SKIPM Mamuju pada TA.2023 sebesar Rp.4,905,696,000,-. Anggaran dan Realisasi Belanja Semester III TA.2023 tersaji pada Tabel sebagai berikut :

URAIAN	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Anggaran
Belanja Pegawai	2.440.978.000	2.438.215.387	99,89%
Belanja Barang	2.191.168.000	2.127.990.714	97,12%
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00%
Belanja Modal	273.550.000	273.493.500	99,98%
Total Belanja Kotor	4.905.696.000	4.839.699.601	98,65%
Pengembalian Belanja			
JUMLAH	4.905.696.000	4.839.699.601	98,65%

Realisasi Belanja bruto SKIPM Mamuju Semester II TA 2023 sebesar Rp.4,839,699,601,- atau sebesar 98,65 %, sedangkan realisasi netto SKIPM Mamuju sebesar Rp.4,839,699,601,- atau sebesar 98,65 %, Dengan rincian realisasi sebagai berikut:

1. Belanja pegawai sebesar Rp.2,438,215,387,-
2. Belanja barang sebesar Rp.2,127,990,714,-
3. Belanja modal sebesar Rp.273,493,500,-

Perbandingan Realisasi Belanja (netto) Semester II TA 2023 dan 2022 tersaji pada Tabel di bawah ini.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester TA 2023 dan 2022



SKIPM Mamuju
Laporan Keuangan Semester II TA 2023

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.438.215.387	2.413.080.535	1,04
Belanja Barang	2.127.990.714	1.520.909.617	39,92
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	273.493.500	209.307.500	30,67
Jumlah	4.839.699.601	4.143.297.652	16,81

Belanja
Pegawai
Rp.
2,438,215,387,
-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Bruto Semester II TA 2023 adalah sebesar Rp.2,438,215,387,- terdapat pengembalian belanja pegawai sebesar Rp. 0,- maka realisasi netto sebesar Rp.2,438,215,387,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di TA.2022 maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 25,134,852,- mengingat realisasi netto belanja pegawai pada TA 2022 sebesar Rp.2,413,080,535,- .

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022



SKIPM Mamuju
Laporan Keuangan Semester II TA 2023

Uraian	Realisasi T.A. 31 Des 23	Realisasi T.A. 31 Des 22	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS			
Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 874.378.800	Rp 891.974.000	Rp (17.595.200)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 11.610	Rp 11.907	Rp (297)
Belanja Tunj.Suami/Istri PNS	Rp 62.361.290	Rp 61.352.910	Rp 1.008.380
Belanja Tunj.Anak PNS	Rp 20.737.138	Rp 20.308.678	Rp 428.460
Belanja Tunj.Struktural PNS	Rp 12.600.000	Rp 16.200.000	Rp (3.600.000)
Belanja Tunj.Fungsional PNS	Rp 73.355.000	Rp 77.510.000	Rp (4.155.000)
Belanja Tunj.PPh PNS	Rp 898.050	Rp 1.006.300	Rp (108.250)
Belanja Tunj.Beras PNS	Rp 51.925.140	Rp 52.142.400	Rp (217.260)
Belanja Uang Makan PNS	Rp 133.635.000	Rp 149.864.000	Rp (16.229.000)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kinerja)	Rp 1.112.520.359	Rp 1.108.018.617	Rp 4.501.742
Belanja Tunjangan Umum PNS	Rp 7.630.000	Rp 4.720.000	Rp 2.910.000
Belanja Tunj. Peg. Non PNS	Rp -	Rp -	Rp -
Belanja Lembur			
Belanja Uang Lembur	Rp 88.163.000	Rp 29.972.000	Rp 58.191.000
JML Bruto	Rp 2.438.215.387	Rp 2.413.080.812	Rp 25.134.575
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp 277	Rp (277)
JML Netto	Rp 2.438.215.387	Rp 2.413.080.535	Rp 25.134.852



SKIPM Mamuju

Laporan Keuangan Semester II TA 2023

Belanja
Barang

Rp2,127,990,7
14,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Bruto Semester III per 31 Desember TA.2023 adalah sebesar Rp.2,127,990,714,-. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja barang bruto pada tahun lalu, maka terjadi peningkatan sebesar Rp. 607,081,097,- mengingat realisasi tahun lalu sebesar Rp.1,520,909,617,- .

Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Barang Operasional	Rp 700.098.702	Rp 484.991.900	Rp 215.106.802
Belanja Barang Non Operasional	Rp 107.036.000	Rp 48.037.400	Rp 58.998.600
Belanja Barang Persediaan	Rp 153.101.985	Rp 137.859.250	Rp 15.242.735
Belanja Jasa	Rp 280.035.938	Rp 426.020.667	(Rp 145.984.729)
Belanja Pemeliharaan	Rp 258.126.134	Rp 181.778.400	Rp 76.347.734
Belanja Perjalanan DN	Rp 629.591.955	Rp 242.222.000	Rp 387.369.955
JML Bruto	Rp 2.127.990.714	Rp 1.520.909.617	Rp 607.081.097
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah Netto	Rp 2.127.990.714	Rp 1.520.909.617	Rp 607.081.097

Belanja Modal
Rp
273,493,500,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 273,493,500 dan Rp.209.307.500. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami Kenaikan sebesar (30,67) % dibandingkan dengan TA 2022



Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI 31 Des 2023	REALISASI 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	273.493.500	209.307.500	30,67
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto	273.493.500	209.307.500	30,67
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	273.493.500	209.307.500	30,67

*Belanja Modal Tanah
Rp.0,-*

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Semester II/per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,-. Tidak terdapat belanja Modal tanah periode 31 Desember 2023 dan 2022.



Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp273,493,000

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II/per 31 Desember TA 2023 adalah sebesar Rp.273,493,000,- mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II/per 31 Desember TA 2022 sebesar Rp.209.307.500,-

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester 1/Per 31 Desember TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	PER 31 Desember 2023	PER 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Kendaraan Bermotor roda 2	-	-	-
Mini Bus	-	-	#DIV/0!
Alat Kantor	-	-	#DIV/0!
Alat Kantor Lainnya	-	-	#DIV/0!
Alat rumah tangga	157.993.500	-	100,00
Alat Studio	-	-	#DIV/0!
Alat Komunikasi	-	-	#DIV/0!
Unit Alat Laboratorium	-	-	#DIV/0!
Komputer Unit	115.500.000	-	#DIV/0!
Peralatan Komputer	-	-	#DIV/0!
Unit peralatan/produksi	273.493.500	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	273.493.500	-	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	273.493.500	-	#DIV/0!

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp
0,-

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester II/per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.209,307,500,- Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.0,- dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Semester II/per 31 Desember TA 2023 dan 2022



SKIPM Mamuju
Laporan Keuangan Semester II TA 2023

URAIAN JENIS BELANJA	PER 31 Des 2023	PER 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Perencanaan dan Pengawaasn Gedung dan Bangunan	-	28.300.000	(100,00)
Perjalanan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	181.007.500	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	-	209.307.500	(100,00)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	209.307.500	(100,00)

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp.0,-

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester II/per 31 Desember TA 2023 sebesar Rp.0,-. Tidak ada penambahan jalan, irigasi dan jaringan sedangkan pada Semester II/per 31 Desember TA 2022 terdapat realisasi Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp.0,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester III/per 31 Desember TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	PER 31 Desember 2023	PER 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Pembuatan Irigasi	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	-	-	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	#DIV/0!

Belanja Modal Lainnya Rp.0,-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Semester II/per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,-. Tidak terdapat belanja modal lainnya semester II/per 31 Desember 2022 pada SKIPM Mamuju.



Belanja
Bantuan Sosial
Rp.0,-

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester II/per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,-. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak terdapat belanja bantuan sosial Semester II/per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 pada SKIPM Mamuju.

Catatan
Penting
Lainnya

B.7 Catatan Penting Lainnya

Laporan Realisasi Belanja secara bruto Semester II/per 31 Desember TA 2023 sebesar **Rp.4,839,699,601,-** atau **98,65 %** dari anggarannya sebesar **Rp. 4,905,696,000,-**. Jika dibandingkan dengan tahun lalu dengan periode yang sama terjadi Kenaikan sebesar **Rp. 696.401.949,-** atau **16,81 %** .



C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas
Bendahara
Pengeluaran
Rp.0,-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0. yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Bendahara Pengeluaran Per Semester II/per 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	per 31 Des 2023	per 31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)
Kas Tunai	0	0	0
Kas Bank	0	0	0
UP yang Belum dipertanggungjawabkan	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Kas
Bendahara
Penerimaan
Rp25,106,745,-
-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan masing-masing Rp.25,106,745,- dan Rp. 9,441,109,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Telah disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Rincian Kas Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

Keterangan	TH 2023	TH 2022
Uang Tunai	25.106.745	9.441.109
Jumlah	25.106.745	9.441.109



Kas Lainnya dan Setara Kas
Rp.0,-

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Tidak terdapat saldo kas lainnya dan setara kas pada SKIPM Mamuju per 31 Desember 2023/ Semester I TA.2023.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Per 30 Juni 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / (Penurunan)
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Piutang Bukan Pajak
Rp. 31,999,-

C.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak pada SKIPM Mamuju pada periode 31 Desember 2023 terdapat saldo Rp 31,999,-. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	Kenaikan / (Penurunan)
Piutang Bukan Pajak	31.999	19.746	12.253
Jumlah	31.999	19.746	12.253

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
Rp0,-

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-



masing sebesar Rp.0,-. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar
TPA Rp.0,-*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0,-. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Pendek
Rp (160),-*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp(160) dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(99) .

Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Belanja
Dibayar
Dimuka
(Prepaid)
Rp.0,-*

C.8 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.0,-. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima
Rp.0,-*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0,-, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

*Pendapatan yang Masih Harus Diterima Per tanggal 31 Desember 2023 dan
31 Desember 2022*



SKIPM Mamuju
Laporan Keuangan Semester II TA 2023

Uraian	PER 31 Des 2023	per 31 Des 2022	Kenaikan / (Penurunan)
Pendapatan yg masih harus diterima	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Persediaan
Rp.
67,895,932,-

C.10 Persediaan

Persediaan merupakan jenis aset yang di bawah nilai kapitalisasi atau barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca dilaporkan tidak lebih dari satu tahun, persediaan tersebut diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Jumlah Persediaan per 31 Desember / Semester III TA.2023 sebesar Rp.67,895,932,- sementara saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 61,323,600,-.

Posisi persediaan pada SKIPM Mamuju dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Persediaan
tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

KODE	URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)
117111	Barang Konsumsi	2.999.440	1.027.500	1.971.940
117112	Amunisi	0	0	-
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	-
117114	Suku Cadang	10.753.800	60.296.100	(49.542.300)
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	-
117128	Barang Lainnya Untuk Dijual	0	0	-
117131	Bahan Baku	54.142.692	0	54.142.692
117191	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	0	0	-
117199	Persediaan Lainnya	0	0	-
JUMLAH		67.895.932	61.323.600	6.572.332



Tagihan
TP/TGR
Rp.0,-

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

TPA
Rp0,-

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp(0)

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(0). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Tanah
Rp.2,741,303,0
00

C.14 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa tanah yang dimiliki SKIPM Mamuju per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2,741,303,000,-. Adapun luas dari aset tanah dengan Nomor Sertifikat 31.05.03.01.4.00038 dengan luas 483m², Nomor sertifikat 31.05.03.01.4.00054 dengan luas 41m², Nomor sertifikat 31.05.03.01.4.00055 dengan luas 37m², Nomor sertifikat



SKIPM Mamuju
Laporan Keuangan Semester II TA 2023

31.05.03.01.4.00070 dengan Luas 1,374 m².

Tidak terdapat penambahan ataupun pengurangan pada Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2023.

*Perubahan Aset Tanah SKIPM Mamuju
Semester I / per 31 Desember 2023*

Saldo per 31 Desember 2020	2.741.303.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 juni 2021	2.741.303.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Luas	Lokasi	Nilai	No.Sertifikat
1	483 m2	Kel.Simboro	624.389.000	31.0503.01.4.00038
2	41 m2	Kel.Simboro	53.002.000	31.0503.01.1.00054
3	37 m2	Kel.Simboro	47.831.000	31.05.03.01.4.00055
4	1,374 m2	Kel.Simboro	2.016.081.000	31.05.03.01.4.00070
Jumlah			2.741.303.000	

*Peralatandan
Mesin Rp.
4,397,498,720,-*

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 senilai Rp. 4,397,498,720,- sedangkan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp. 4,121,133,220,-

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Perubahan Peralatan dan Mesin SKIPM Mamuju per 31 Desember 2023

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2022	4.121.133.220
Mutasi tambah:	
Pembelian	273.493.500
Transfer Masuk	2.872.000
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Des 2023	4.397.498.720
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2023	3.567.677.361
Nilai Buku per 31 Des 2023	829.821.359



Akumulasi penyusutan sampai dengan Semester II / per 31 Desember 2023 aset peralatan dan mesin dengan total nilai Rp.(3,567,677,361,-).

Gedungan
Bangunan Rp.
6,701,292,867,-

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp. 6,701,292,867,-. Mutasi/perubahan Aset Gedung dan Bangunan (133111) dapat disajikan sebagai berikut:

*Perubahan Gedung dan Bangunan SKIPM Mamuju
per 31 Desember 2023*

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2022	6.701.292.867
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Des 2023	6.701.292.867
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2023	570.086.550
Nilai Buku per 31 Des 2023	6.131.206.317

Jalan,
Irigasidan
Jaringan Rp.
221,640,000,-

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp221,640,000,- sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 221,640,000,-.

Tidak terdapat mutasi tambah Jalan,Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023. Mutasi/perubahan Aset Jalan,Irigasi dan Jaringan dapat disajikan pada tabel berikut:

*Perubahan Aset Jalan , Irigasi dan Jaringan SKIPM Mamuju per 31
Desember 2023*



Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	221.640.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2023	221.640.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	23.551.250
Nilai Buku per 31 Desember 2023	198.088.750

Mutasi Kurang berupa Akumulasi penyusutan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. (23,551,250)

Aset Tetap Lainnya
Rp.
47,034,000,-

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.47,034,000,- dan Rp.47,034,000,-. Aset tetap tersebut berupa buku referensi untuk pemeriksaan HPI/HPIK Laboratorium. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2023.

Konstruksi dalam Pengerjaan
Rp.0,-

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (132111) pada Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp0,-. Konstruksi dalam pengerjaan berupa Rehabilitasi Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp.
(4,391,131,058)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp(4,391,131,058) dan Rp(3,928,770,125). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam



SKIPM Mamuju
Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023

Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Barang Per 31 Desember 2023

NO	ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Peralatan dan Mesin	4.397.498.720	3.725.329.306	672.169.414
2	Gedung dan Bangunan	6.701.292.867	639.418.877	6.061.873.990
3	Jalan,Irigasi dan Jaringan	221.640.000	26.382.875	195.257.125
4	Aset Tetap Lainnya	47.034.000	-	47.034.000
TOTAL		11.367.465.587	4.391.131.058	6.976.334.529

Aset tak berwujud (ATB) Rp. 0,-

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) SKIPM Mamuju per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,- sementara saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

AsetLain-Lain Rp. 0,-

C.22 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain pada SKIPM Mamuju sampai periode laporan Semester I / 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Aset lain-lain ini merupakan Aset tetap dan Aset tak berwujud yang tidak digunakan Dalam Operasional Pemerintah. Adapun Mutasi Aset lain-lain adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
-penghentian aset	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-



Rincian Aset Lain-lain berasal dari Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, tersaji pada tabel berikut:

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Peralatan dan Mesin	0	0
2	Software Komputer	0	0
Jumlah		0	0

*Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset Lainnya
Rp(0)*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp (0) dan Rp(0). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yg tidak digunakan dalam operasional pemerintah	0	0
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yg tidak digunakan dalam operasional pemerintah	0	0
Jumlah		0	0



Uang Muka
dari KPPN
Rp.0,-

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp.10,452,016
,-

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.10,452,016,- dan Rp9,411,900,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31-Des-23	31-Des-22
1	Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar	-	-
2	Uang Lembur Pegawai yg blm dibayar	-	-
3	Tagihan Internet	789.050	-
4	Tagihan Listrik	8.564.636	7.879.600
5	Tagihan Telepon	671.830	1.029.500
6	Tagihan Air	426.500	502.800
Jumlah		10.452.016	9.411.900



*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp.0*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp.0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

*Beban yang
masih harus
dibayar
Rp.0*

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Beban yang masih harus dibayar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp.0. Beban yang masih harus merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

*Ekuitas
Rp.
10,004,929,181,
-*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 10,004,929,181,- dan Rp. 9,955,564,309,-

,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
PNBP
Rp. 19,085,00
0,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 19,085,000,- dan Rp. 7,340,000,-.

Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	19.085.000	7.340.000	(42)
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	19.085.000	7.340.000	160,01

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya (425289).

Beban
Pegawai Rp.
2,438,183,388,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.2,438,183,388,- dan Rp. 2,413,080,535,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban
Persediaan
Rp. 82,861,033,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.82,861,033,- dan Rp. 117,574,000,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak



dipasarkan.

*Beban Jasa
Rp.
1,088,210,756,-*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1,088,210,756,- dan Rp. 959,355,950,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

*Beban
Pemeliharaan
Rp.
322,127,504,-*

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.322,127,504,- dan Rp. 199,742,350,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

*Beban
Perjalanan
Dinas Rp.
629,591,955,-*

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.629,591,955,- dan Rp. 242,222,000,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp.0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2022.

*Beban
Bantuan
Sosial Rp.0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-



masing sebesar Rp.0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi Rp.
460,350,533,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.460,350,533,- dan Rp. 481,875,879,-.Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
TertagihRp 0,-

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(0),- dan Rp(4,913),-

Beban Lain-
lain Rp.0

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Surplus
/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.6,001,999,
-

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing- masing sebesar Rp.6,001,999,- dan Rp. (4,892,648),-.



Pos Luar
Biasa Rp(0)

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat Pos Luar Biasa pada SKIPM Mamuju per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp
.9,955,564,309,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.9,955,564,309,- dan Rp 10,233,105,037,-.

Defisit LO
Rp.
(4,996,238,330)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(4,996,238,330) dan Rp(4,411,397,715). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian
Nilai Aset
Rp.0,-

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset periode yang berakhir pada **31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022** adalah masing-masing sebesar Rp.0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp.0,-

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0,-



Selisih
Revaluasi
Aset Tetap
Rp.0,-

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.

Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp. 0,-

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-
Lain Rp99

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp99,- dan Rp (2,011,251),-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi
Antar Entitas
Rp.
4,815,787,206
,-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas merupakan pengimbang surplus/defisit. Pos tersebut merupakan selisih antara akun **Ditagihkan Ke Entitas Lain** dan **Diterima Dari Entitas Lain** yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Transaksi antar entitas untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 4,815,787,206,- dan Rp. 4,133,856,543,-.

Ekuitas Akhir
Rp.
9,775,113,284

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 9,775,113,284,- dan Rp. 9,955,564,309



F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat temuan Kejadian Penting pada satker Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju setelah tanggal neraca Semester I per 31 Desember 2023.